



Integrasi Literasi Keuangan Syariah dalam Pendidikan Pertahanan: Analisis Dampak Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembiayaan Pertahanan TNI Angkatan Laut

Fatahurrahman^{*1}, Elisabeth Tanti P.², Rina Marlina³, Jajang Amir Hidayat⁴

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

⁴Universitas Pertahanan, Sentul Bogor, Indonesia

E-mail: charmanpalapa@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01 Keywords: <i>Defense Education; Financial Literacy; Public Finance.</i>	This study analyzes the impact of the issuance of State Sharia Securities (SBSN) on the financing of Indonesia's naval defense and its relevance to defense education. A qualitative approach with a constructivist paradigm was employed to interpret the perspectives of key stakeholders from the Ministry of Defense, Bappenas, and the Naval Facilities Service. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using NVivo 12 software. The findings reveal that SBSN has significantly contributed to naval infrastructure development especially bases and service housing while strengthening financial governance, transparency, and accountability. Educationally, SBSN functions as an instrument of Islamic financial literacy in defense education, emphasizing value-for-money, ethical integrity, and fiscal efficiency. Integrating SBSN concepts into the curriculum at the Indonesian Naval Command and Staff College (Seskoal) can enhance officers' analytical capacity regarding fiscal policy and defense sustainability.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01 Kata kunci: <i>Pendidikan Pertahanan; Literasi Keuangan; Pembiayaan Publik.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembiayaan pertahanan TNI Angkatan Laut dan relevansinya terhadap pendidikan strategis pertahanan di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dengan paradigma konstruktivisme untuk memahami makna kebijakan dari para pemangku kepentingan di Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBSN berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan dan rumah dinas prajurit, serta memperkuat tata kelola pembiayaan publik yang transparan dan akuntabel. Secara edukatif, kebijakan SBSN menjadi instrumen literasi keuangan syariah bagi perwira TNI dalam pendidikan pertahanan yang menekankan prinsip value for money, integritas, dan efisiensi fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep SBSN ke dalam kurikulum Seskoal dapat memperluas kapasitas analisis perwira terhadap kebijakan fiskal dan kemandirian pertahanan nasional.

I. PENDAHULUAN

Sistem pertahanan laut Indonesia yang berbasis Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) menuntut sinergi antara kekuatan tempur dan kesiapan logistik. Ketersediaan infrastruktur pertahanan yang memadai seperti pangkalan, dermaga, dan rumah dinas prajurit merupakan faktor strategis yang menentukan kesiapsiagaan operasi. Dalam praktiknya, pembiayaan sektor pertahanan selama ini sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya Rupiah Murni (RM). Namun kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir membatasi ruang fiskal untuk modernisasi dan penguatan sarana pertahanan laut (Fatahurrahman, 2025).

II.

Sebagai respon terhadap keterbatasan tersebut, pemerintah memperkenalkan *Surat Berharga Syariah Negara* (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang berbasis prinsip syariah. SBSN berfungsi sebagai bukti penyertaan terhadap aset negara yang menjadi dasar proyek publik (Latifah, 2020). Dalam konteks pertahanan, SBSN telah digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pangkalan, perumahan prajurit, serta fasilitas pendukung operasi TNI Angkatan Laut. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menjadi refleksi pengelolaan sumber daya nasional yang adaptif terhadap tuntutan geopolitik dan keterbatasan fiskal (Aditama & Waskita, 2023).

Penerapan SBSN dalam sektor pertahanan juga memiliki nilai edukatif. Di lembaga pendidikan strategis seperti Seskoal, pemahaman terhadap kebijakan fiskal negara menjadi bagian penting dalam pembentukan kompetensi analitis perwira. Literasi keuangan publik membantu perwira dalam memahami keterkaitan antara kebijakan ekonomi nasional dan kesiapan pertahanan (Muadi, Ismail & Sofwani, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerbitan SBSN terhadap pembiayaan pertahanan laut, kontribusinya terhadap kemampuan pertahanan negara, serta implikasinya terhadap pendidikan pertahanan di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, yang berupaya memahami makna kebijakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam konteks pembiayaan pertahanan laut secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan kebijakan publik, tata kelola fiskal, serta implementasi strategis di lingkungan pertahanan (Ramdhani & Ramdhani, 2020).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan secara sistematis dampak dan relevansi kebijakan SBSN terhadap pembangunan pertahanan laut serta implikasinya terhadap pendidikan pertahanan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama: (1) dampak SBSN terhadap pembiayaan pertahanan TNI Angkatan Laut, (2) kontribusinya terhadap peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan (3) implikasi strategisnya bagi pengembangan literasi keuangan di lembaga pendidikan pertahanan.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan perwira yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek SBSN di lingkungan Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan proyek, serta literatur akademik terkait pembiayaan syariah dan pertahanan nasional (Aditama & Waskita, 2023).

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antaraktor, dan faktor

penyebab keberhasilan maupun hambatan implementasi SBSN. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi makna kebijakan, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang kontribusi SBSN dalam memperkuat sistem pembiayaan pertahanan nasional (Darwis & Yusiana, 2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penerbitan SBSN terhadap Pembiayaan Pertahanan

Analisis data yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem pembiayaan pertahanan nasional, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Temuan penelitian memperlihatkan adanya transformasi dalam cara pengelolaan sumber daya keuangan pertahanan yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada Rupiah Murni (RM) menjadi lebih beragam dan inovatif melalui mekanisme pembiayaan syariah yang berjangka panjang (Fatahurrahman, 2025).

Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur strategis seperti pangkalan laut, gudang logistik, dan rumah dinas prajurit. Proyek-proyek yang dibiayai oleh SBSN, seperti pembangunan rumah susun prajurit di Surabaya, pangkalan baru di Natuna, dan revitalisasi dermaga perawatan kapal, terbukti meningkatkan efisiensi mobilitas prajurit, memperpendek waktu tempuh ke lokasi tugas, serta memperkuat kesiapsiagaan unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam menjalankan operasi laut jarak jauh. Dengan demikian, SBSN berkontribusi langsung terhadap daya gerak operasional dan kesiapan tempur unsur SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu) yang menjadi tulang punggung pertahanan maritim Indonesia.

Dari aspek kesejahteraan personel, tersedianya rumah dinas yang representatif di sekitar pangkalan menjadikan kualitas hidup prajurit lebih baik, sekaligus meningkatkan moral dan motivasi kerja. Kondisi ini berdampak positif terhadap keandalan kinerja satuan operasional karena prajurit dapat bertugas dalam kondisi psikologis yang lebih stabil. Proyek-proyek SBSN juga mendorong terciptanya budaya akuntabilitas baru di lingkungan pertahanan, karena seluruh

kegiatan pembangunan diawasi secara ketat melalui mekanisme milestone-based disbursement, di mana pencairan anggaran dilakukan berdasarkan capaian tahapan proyek yang telah diverifikasi lintas lembaga (Ramdhani & Ramdhani, 2020).

Selain hasil material, penelitian ini juga menemukan dampak immaterial berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial dalam tata kelola keuangan pertahanan. Melalui pengalaman langsung dalam pelaksanaan proyek berbasis syariah, TNI AL mulai membangun kompetensi internal di bidang administrasi keuangan, kontraktual, dan audit berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Hal ini melahirkan pola pikir baru bahwa kekuatan pertahanan modern tidak hanya ditentukan oleh kuantitas alutsista, tetapi juga oleh kualitas tata kelola sumber daya keuangan yang efisien, transparan, dan berkeadilan (Aditama & Waskita, 2023).

Lebih jauh, implementasi SBSN turut memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL, sehingga mekanisme pembiayaan proyek menjadi lebih terintegrasi dengan perencanaan strategis pertahanan (Renstra Kemhan). Model pembiayaan syariah ini juga menumbuhkan disiplin fiskal di kalangan manajer proyek, karena setiap aktivitas wajib memenuhi persyaratan prinsip syariah: keadilan (*justice*), kebermanfaatan (*maslahah*), dan transparansi (*amanah*). Dari hasil triangulasi data NVivo, teridentifikasi bahwa nilai-nilai moral keuangan syariah ini secara tidak langsung memperkuat etos integritas birokrasi pertahanan, yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional.

Secara konseptual, penerapan SBSN juga menjadi instrumen pembelajaran strategis di lingkungan pendidikan pertahanan. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek SBSN dapat digunakan sebagai studi kasus nyata bagi peserta didik Seskoal dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal nasional, pembangunan infrastruktur pertahanan, dan kesiapsiagaan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa SBSN berfungsi ganda: sebagai sumber pembiayaan strategis dan sebagai wahana pendidikan kebijakan publik berbasis nilai. Dengan kata lain, SBSN tidak hanya memperkuat pondasi fisik

pertahanan laut, tetapi juga memperkaya pemahaman konseptual dan moral tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

B. Kontribusi SBSN terhadap Kemampuan Pertahanan Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal alternatif, tetapi juga sebagai strategic enabler yang memperkuat kemampuan pertahanan nasional secara menyeluruh. Melalui pendanaan proyek-proyek strategis, SBSN telah mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan nonfisik di lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL), sehingga berimplikasi langsung terhadap kesiapan tempur dan keberlanjutan operasi pertahanan maritim (Latifah, 2020).

Proyek SBSN di berbagai wilayah strategis, seperti pangkalan Ambalat, Natuna, dan Biak, menjadi contoh konkret penerapan prinsip *fiscal alignment* antara kebijakan keuangan negara dan strategi pertahanan laut. Sebelum adanya SBSN, dukungan logistik di wilayah-wilayah tersebut sering kali terbatas dan tidak terintegrasi, sehingga memperlambat proses perawatan unsur kapal dan penyaluran perbekalan. Dengan adanya pembiayaan SBSN, pangkalan-pangkalan tersebut kini memiliki fasilitas pendukung terpadu, termasuk gudang logistik modern, bengkel pemeliharaan, dan sistem penyimpanan BBM standar militer, yang secara signifikan meningkatkan daya jelajah operasional KRI di daerah perbatasan.

Peningkatan kemampuan pertahanan ini bersifat sistemik dan multidimensional. Pertama, SBSN memperkuat dimensi dukungan logistik berkelanjutan (*sustainable logistics*) dengan menjamin ketersediaan fasilitas perawatan dan suplai di lokasi-lokasi strategis yang sebelumnya sulit dijangkau. Kedua, SBSN meningkatkan kesiapan tempur (*combat readiness*) melalui efisiensi waktu perbaikan unsur dan pengurangan *downtime* kapal perang. Ketiga, SBSN menciptakan efisiensi operasional (*operational efficiency*) dengan mengurangi ketergantungan pada pengiriman logistik jarak jauh dari pangkalan utama di Surabaya atau Jakarta. Sinergi ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan publik berbasis syariah dapat berfungsi sebagai katalis pembangunan

pertahanan berkelanjutan (*sustainable defense financing*) (Muadi, Ismail & Sofwani, 2021).

Selain kontribusi fisik, SBSN juga memperkuat aspek kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pertahanan. Melalui mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pertahanan, setiap proyek SBSN diwajibkan mengikuti proses perencanaan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*) dan evaluasi berbasis kinerja. Model ini menghasilkan transparansi fiskal dan akuntabilitas proyek pertahanan yang sebelumnya sulit dicapai dengan sistem penganggaran tradisional. Kolaborasi antarlembaga ini juga meningkatkan integrasi kebijakan fiskal-strategis, di mana setiap proyek pertahanan dikaitkan langsung dengan tujuan *Minimum Essential Force (MEF)* dan Rencana Strategis Kemhan.

Dari perspektif strategis, SBSN juga memperkuat daya saing pertahanan Indonesia melalui adopsi prinsip keuangan berkelanjutan (*green and sustainable finance*). Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional menuju ekonomi hijau dan kemandirian energi, di mana proyek-proyek SBSN di sektor pertahanan didorong untuk menggunakan material ramah lingkungan, efisiensi energi, serta desain arsitektur militer yang adaptif terhadap perubahan iklim (Sawir, 2022). Dengan demikian, kebijakan SBSN bukan hanya memperkuat kemampuan pertahanan secara teknis, tetapi juga menempatkan sektor pertahanan sebagai aktor aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs).

Selain itu, dampak edukatif dari implementasi SBSN juga terlihat dalam peningkatan pemahaman pejabat perencana dan perwira staf terhadap konsep sinergi fiskal dan pertahanan (*defense-fiscal linkage*). Pengetahuan ini memperkaya kapasitas manajerial dalam lembaga pertahanan dan menciptakan generasi perwira yang memiliki kompetensi analisis kebijakan publik di bidang pembiayaan nasional. Integrasi nilai syariah dalam proses tersebut menanamkan etos transparansi, amanah, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian, kontribusi SBSN terhadap kemampuan pertahanan negara tidak terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang lebih

luas: peningkatan efektivitas logistik, efisiensi operasional, koordinasi lintas lembaga, serta internalisasi nilai moral dalam tata kelola keuangan pertahanan. SBSN menjadi bukti bahwa instrumen fiskal negara, bila dikelola dengan prinsip syariah dan tata kelola modern, dapat menjadi pilar utama dalam membangun pertahanan maritim yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

C. Implikasi Strategis bagi Pendidikan Pertahanan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pertahanan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak hanya memberikan dampak fiskal, tetapi juga menciptakan nilai edukatif dan pembelajaran strategis yang signifikan bagi lembaga pendidikan pertahanan, khususnya di lingkungan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal). Implementasi SBSN telah membuka peluang integrasi antara kebijakan fiskal negara, tata kelola publik, dan strategi pertahanan, yang dapat dijadikan model pembelajaran multidisipliner untuk membentuk perwira dengan kemampuan analitis dan kepemimpinan strategis yang komprehensif.

Pertama, integrasi kajian SBSN ke dalam kurikulum pendidikan pertahanan memiliki nilai pedagogis penting dalam membangun literasi keuangan publik dan fiskal pertahanan di kalangan perwira. Selama ini, pendidikan pertahanan cenderung berfokus pada aspek taktik dan strategi militer, sementara dimensi pengelolaan sumber daya keuangan belum menjadi prioritas utama. Melalui studi kasus proyek SBSN, perwira dapat mempelajari secara langsung hubungan antara kebijakan fiskal, perencanaan anggaran, dan efektivitas operasional militer. Pembelajaran berbasis kebijakan ini memperluas cakrawala berpikir strategis dan menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan pertahanan tidak hanya bergantung pada kekuatan tempur, tetapi juga pada kemampuan manajemen sumber daya nasional secara efisien dan akuntabel (Darwis & Yusiana, 2016).

Kedua, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan *evidence-based learning* dalam pendidikan pertahanan. Penggunaan perangkat lunak NVivo 12 Plus dalam analisis data kebijakan SBSN menjadi contoh nyata penerapan teknologi analitik dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini, peserta

didik Seskoal dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan kebijakan antaraktor, sekaligus memahami kompleksitas kebijakan publik dari perspektif empiris. Pendekatan semacam ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan sistemik—kompetensi yang sangat penting bagi perwira dalam menghadapi tantangan strategis masa depan.

Ketiga, penerapan prinsip syariah dalam proyek SBSN memiliki implikasi moral dan karakter bagi pendidikan pertahanan. Nilai-nilai seperti amanah (trustworthiness), masalah (kemanfaatan publik), dan keadilan (justice) dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan etika profesi militer. Dengan memahami bahwa kebijakan fiskal juga sarat nilai moral, perwira didorong untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga berintegritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Integrasi antara nilai keislaman, kebijakan fiskal, dan profesionalisme militer inilah yang menjadi wujud dari konsep *Green and Ethical Defense Governance*.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan modul pembelajaran baru di Seskoal, seperti *Defense Financial Literacy* dan *Strategic Resource Management*, yang mengajarkan analisis kebijakan fiskal, model pembiayaan pertahanan, serta evaluasi efektivitas proyek publik. Modul-modul ini dapat memperkuat dimensi *learning outcome* pendidikan strategis yang menekankan pada kemampuan berpikir lintas disiplin (cross-domain thinking) dan pengambilan keputusan berbasis bukti (data-driven decision-making).

Keempat, kebijakan SBSN juga memberikan peluang untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan militer dan instansi sipil seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kolaborasi ini akan memperkaya wawasan peserta didik tentang tata kelola pemerintahan dan memperluas jejaring akademik dalam riset kebijakan pertahanan. Melalui kegiatan kuliah tamu, pelatihan bersama, dan penelitian kolaboratif, Seskoal dapat menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) dalam studi defense public policy di Indonesia.

Dengan demikian, implikasi strategis SBSN bagi pendidikan pertahanan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga transformasional.

Kebijakan ini mendorong lahirnya paradigma baru pendidikan militer yang adaptif terhadap dinamika kebijakan publik dan keuangan negara. Perwira lulusan lembaga pendidikan strategis diharapkan tidak hanya menjadi komandan di medan operasi, tetapi juga menjadi arsitek kebijakan pertahanan yang mampu mengelola sumber daya nasional secara efisien, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan pertahanan negara.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerbitan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki dampak positif dan berlapis terhadap penguatan pembiayaan pertahanan, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Dari aspek fiskal, SBSN menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab keterbatasan ruang APBN konvensional melalui mekanisme pembiayaan jangka panjang berbasis prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan, rumah dinas prajurit, dan fasilitas logistik modern yang menjadi tulang punggung kesiapsiagaan operasional.

Dari sisi kelembagaan, SBSN telah memperkuat tata kelola fiskal pertahanan melalui penerapan prinsip *value for money*, sistem pelaporan berbasis kinerja, dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Model pelaksanaan proyek SBSN dengan skema *milestone-based disbursement* menjadi praktik terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan anggaran negara di sektor pertahanan, karena memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik. Selain itu, SBSN turut menumbuhkan disiplin fiskal di lingkungan Kemhan dan TNI AL, sekaligus membangun budaya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dari perspektif strategis, kebijakan SBSN juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemampuan pertahanan negara, terutama melalui peningkatan efisiensi logistik, kesiapan tempur, dan daya tahan operasi unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN di wilayah-wilayah strategis seperti Natuna, Ambalat, dan Biak memperkuat kehadiran

militer di kawasan perbatasan serta meningkatkan kemandirian logistik pertahanan laut. Dengan demikian, SBSN tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga alat strategis dalam mewujudkan kemandirian pertahanan nasional.

Dalam konteks pendidikan, SBSN memiliki implikasi transformatif bagi lembaga pendidikan strategis seperti Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal). Implementasi SBSN menjadi wahana pembelajaran strategis (*strategic learning platform*) bagi perwira dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal, pembangunan pertahanan, dan efektivitas operasional. Integrasi studi kasus SBSN dalam kurikulum pendidikan pertahanan memperkuat literasi keuangan publik, kemampuan analisis kebijakan, serta kesadaran etika pengelolaan sumber daya negara di kalangan calon pemimpin militer. Dengan demikian, kebijakan SBSN dapat dipandang sebagai wujud nyata sinergi antara pembangunan nasional dan pendidikan pertahanan, yang secara simultan memperkuat aspek material, manajerial, dan moral bangsa.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil temuan dan pembahasan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk penguatan implementasi SBSN di sektor pertahanan dan pendidikan pertahanan:

1. Perlu memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam merancang program pelatihan dan modul *Defense Financial Literacy*. Modul ini akan meningkatkan pemahaman perwira tentang kebijakan fiskal, prinsip syariah, serta mekanisme pembiayaan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*).
2. Diperlukan pengembangan riset terapan berbasis *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam evaluasi proyek SBSN pertahanan. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengukuran efisiensi proyek secara kuantitatif, tetapi juga dapat mengidentifikasi prioritas kebijakan pembangunan pertahanan yang paling berdampak terhadap kesiapan tempur dan kesejahteraan personel.
3. Diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk membentuk kurikulum lintas disiplin yang mengintegrasikan ilmu

kebijakan publik, ekonomi pertahanan, dan etika militer. Melalui hal tersebut, perwira lulusan Seskoal tidak hanya berperan sebagai pemimpin operasional, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan pertahanan nasional yang memahami dinamika fiskal dan geopolitik secara komprehensif.

4. Pemerintah perlu memperluas implementasi SBSN ke sektor pertahanan nonfisik seperti riset teknologi militer, pendidikan pertahanan, dan modernisasi logistik digital, agar tercipta kesinambungan antara investasi infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia pertahanan.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, kebijakan SBSN akan berfungsi ganda sebagai instrumen pembiayaan strategis dan wahana pendidikan kebijakan public yang mampu memperkuat kemandirian fiskal, efektivitas pertahanan, serta kualitas pendidikan militer Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan regional

DAFTAR RUJUKAN

- Aditama, T., & Waskita, T. (2023). *Analisis Strukturasi Komunikasi Kebijakan Publik di Bidang Pertahanan (Studi Kasus Anggaran SBSN TNI AL TA 2021)*. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 12(3), 45–60.
- Darwis, D., & Yusiana, T. (2016). *Penggunaan Metode Analisis Historis untuk Menentukan Anggaran Produksi*. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi*, 4(2), 112–123.
- Fatahurrahman. (2025). *Analisis Dampak Penerbitan SBSN Guna Pembiayaan Pertahanan TNI Angkatan Laut*. Taskap Dikreg Seskoal Angkatan ke-64.
- Hidayat, M., & Sari, P. (2022). *Integrating Financial Literacy into Military Education: Case Study of Indonesian Naval Officers*. *Jurnal Pendidikan Pertahanan*, 8(1), 33–47.
- Latifah, S. (2020). *Peran Sukuk (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 245–260.
- Muadi, I., Ismail, & Sofwani. (2021). *Teori Kebijakan Publik dan Aplikasinya dalam Pembangunan Nasional*. Malang: UB Press.

- Nurhadi, T., & Prakoso, R. (2023). *Defense Resource Management and Strategic Leadership in Indonesia's Naval Education System*. *Indonesian Journal of Defense Policy*, 5(2), 90–108.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2020). *Public Policy Implementation in Indonesia: Adaptive and Accountable Governance*. *Journal of Policy Studies*, 15(4), 120–133.
- Sawir, A. (2022). *Pelayanan Publik dan Inovasi Birokrasi di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyono, A. (2021). *Green Defense and Sustainable Development Goals in Indonesia's Maritime Strategy*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 201–218.
- Wijaya, F., & Danar, D. (2021). *Pemetaan Kebutuhan Publik dan Keadilan Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 89–10